

KARTU TANDA PENDUDUK TANPA KOLOM AGAMA DALAM PERSPEKTIF EKSISTENSIALISME SARTRE

Surya Desismansyah Eka Putra

Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono No. 169 Malang

email: surya.desismansyah@gmail.com

Abstract: The concept of freedom is a form of analysis on how the free word was present and exist as a tangible manifestation of the contemporary world in the face of uncertainty. Humans really want to look for its existence as a creature. Existentialism tried to leave the path of light that human nature is the existence in the world. Is a self-proclaimed Sartre the existentialist philosophy of abiding by its main slogan, “Man is condemned to be free”, and therefore “existence precedes essence”. Discussion of existentialism is related to the phenomenon of the elimination of religion column in the National Identity Card in Jakarta. Policy toward the National Identity Card would try to analyze the concept of freedom of Sartre’s existentialism using conflict as an epistemological approach Sartre’s existentialism. In keeping with the theme, this article seeks to uncover the link between the elimination of religion column with Sartre’s existentialism models. Because basically atheistic existentialism concept and not so see the side of spiritualism as the main thing

Keyword: national identity card, existentialism, sartre

Abstrak: Konsep kebebasan merupakan wujud analisa tentang bagaimana kata bebas itu hadir dan eksis sebagai wujud nyata dalam menghadapi ketidakpastian dunia kontemporer. Manusia benar-benar ingin mencari eksistensinya sebagai makhluk. Eksistensialisme mencoba memberikan jalan terang bahwa hakikat manusia adalah keberadaannya dalam dunia. Adalah Sartre yang menyatakan diri sebagai filsuf eksistensialis taat dengan semboyan utamanya, “manusia dikutuk untuk bebas”, oleh sebab itu “eksistensi mendahului esensi”. Pembahasan eksistensialisme ini berkaitan dengan fenomena penghapusan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk di Jakarta. Kebijakan terhadap Kartu Tanda Penduduk tersebut akan mencoba dianalisis pada konsep kebebasan eksistensialisme Sartre dengan menggunakan pendekatan konflik sebagai epistemologi eksistensialisme Sartre. Sesuai dengan tema tersebut, artikel ini berusaha mengungkap keterkaitan antara penghapusan kolom agama dengan model eksistensialisme Sartre. Karena pada dasarnya konsep eksistensialisme bersifat ateistik dan tidak begitu melihat sisi spiritualisme sebagai hal yang utama.

Kata Kunci: kartu tanda penduduk, eksistensialisme, sartre.

Konsep kebebasan yang akhir-akhir ini di dengungkan seakan menjadi hambar ketika banyak manusia mengedepankan kebebasan hak tanpa melihat keterpenuhan kewajibannya. Antara hak dan kewajiban pada kebebasan selalu menjadi diskursus berkepanjangan. Namun sorotan utama tentang konsep kebebasan adalah bagaimana kebebasan itu hadir dan eksis sebagai wujud nyata dalam menghadapi ketidakpastian dunia kontemporer atau *postmodernisme* saat ini. Di era kontemporer sekarang, *bebas* berarti benar-benar lepas dari nilai dan norma masyarakat untuk

untuk memburu konsep eksistensi manusia. Eksistensi yang dimaksud adalah keberadaan diri manusia pada realitas yang secara nyata diilhami manusia sebagai hakikat manusia. Bila berbicara tentang eksistensi, tentu tidak bisa lepas dari aliran filsafat eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang cukup digemari hingga kini. Bahkan eksistensialisme telah menjadi mode yang luas di masa (lalu dan masa) ini, dan barangkali tidak ada yang lebih banyak dibicarakan selain eksistensialisme (Leahy, 1985:58).

Tema kebebasan yang menjadi ciri khas eksistensialisme selalu menarik untuk dibahas dan dikaji. Alasan utamanya, eksistensialisme merupakan sebuah gerakan filsafat kontemporer yang menekankan kebebasan dan keberanian untuk “menindak”. Artinya, kaum eksistensialis bukan sekadar sekumpulan ekstrimis, tetapi semua manusia yang mengakui dirinya sebagai seorang eksistensialis seperti para musikus, pelukis, bahkan kolumnis pun juga menjadi bagian kaum eksistensialis (Sartre, 1960: 25). Tema kebebasan yang dibawa kaum eksistensialis bergerak dari perjuangan pembebasan diri dari ketertindasan menuju gerakan pembebasan individual yang mengedepankan tuntutan hak pribadi di atas segala kepentingan. Dan adalah Sartre, filsuf pertama yang memperkenalkan konsep kebebasan eksistensial sebagai jalan menemukan hakikat manusia sesungguhnya.

Sesuai dengan latar belakang tersebut, penulisan artikel ini akan cenderung membahas konsep eksistensialisme yang dibawa oleh Sartre; relevansi eksistensialisme Sartre dengan konsep kebebasan manusia dan pentingnya hak untuk bebas dibela sedangkan keterpenuhan kewajiban terabaikan. Pembahasan konsep kebebasan eksistensialisme Sartre ini akan dikorelasikan dengan fenomena penghapusan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Jakarta beberapa waktu lalu. Namun apakah fenomena tersebut akan dikupas menggunakan konsep eksistensialisme Sartre dan disilang-pandangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Filsafat merupakan kajian umum yang membahas bagaimana suatu hakikat itu ditemukan atau ada pada sesuatu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “filsafat /fil-sa-fat/ adalah 1. Pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya; 2. Teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan; 3. Ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi; 4. Falsafah” (Kbbi, 2014). Sedangkan dari etimologi, filsafat berasal dari kata kata *falsafah* atau *filsafat* yang dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab *فلسفة*, yang juga diambil dari bahasa Yunani; *φιλοσοφία*, *philosophia*. Dalam bahasa ini, kata ini merupakan kata majemuk dan berasal dari kata-kata (*philia* = persahabatan, cinta dsb.) dan (*sophia* = “kebijaksanaan”). Sehingga arti harafiahnya adalah seorang “pencinta kebijaksanaan”. Dalam

filsafat ini sendiri, terdapat banyak aliran, salah satunya adalah eksistensialisme.

Eksistensialisme sebenarnya muncul pertama kali ketika seorang filsuf bernama Søren Kierkegaard yang menyatakan bahwa kebenaran tertinggi dicapai bukan dengan mengetahui kecocokannya dengan pemikiran, melainkan manusia harus mengada secara individual (Kaufmann, 1976: 117). Kierkegaard mengandaikan setiap kebenaran dianggap benar jika membuat manusia itu mengada secara tanggung jawab dalam wujud individu atau pribadinya sendiri. Bukan karena dia cocok atau tidak cocok dengan yang ada pada pemikirannya sendiri. Pandangan Kierkegaard ini lebih menyoroti nuansa keberagaman kaum Katolik pada saat itu. Kierkegaard menganggap bahwa kaum Katolik hanya menerima saja (*taken for granted*) ajaran agama Katolik tetapi tidak menghayati agamanya secara sungguh-sungguh dan eksistensial sebagai pribadi. Namun kemudian, konsep eksistensialisme Kierkegaard diradikalisasi Sartre dengan mendoktrinasi agama adalah *pengganggu* manusia dalam menciptakan kebebasannya sendiri. Sartre memandang agama tidaklah penting bagi manusia, sehingga manusia tidak perlu *repot* mematuhi segala ajarannya. Agama akan menghadirkan Tuhan yang hanya membatasi kebebasan manusia.

Jauh sebelum membahas eksistensialisme sebagai bentuk aliran pemikiran, pernyataan tentang *eksis* dan eksistensial sebenarnya sudah cukup akrab di telinga. Sering kali kita mendengar orang lain mengatakan, “saya ingin *eksis* di manapun dan kapanpun (di dunia maya)”. Secara mendasar kata *eksis* di sini menunjukkan bahwa manusia ingin menjadi dirinya sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Akan tetapi kata *eksis* tadi belum sepenuhnya terbangun. Khususnya persoalan eksistensi manusia di dunia maya yang lebih sering memperlihatkan kelebihan daripada kekurangan manusia. Eksistensi manusia di dunia maya belum otentik, dengan alasan tidak adanya tanggung-jawab moral eksistensial terhadap kejelekan atau kekurangan pada manusia tadi. Bagi Sartre, manusia *mengada* dengan kesadaran sebagai diri sendiri (yang utuh), dan eksistensinya adalah keterbukaan (Hassan, 1973: 93). Artinya manusia bertanggung-jawab terhadap dirinya sendiri, apapun makna atau *image* yang hendak disematkan orang lain padanya. Dalam segi inilah Sartre menghendaki agar manusia memiliki

kebebasan total dan bertanggung-jawab secara utuh atas kebaikan dan keburukan pada dirinya.

BIOGRAFI SARTRE

Sekilas tentang biografi Jean-Paul Sartre. Sartre merupakan filsuf Perancis yang lahir di Paris di tahun 1905. Dia terkenal menjadi seorang filsuf pertama yang menyatakan diri sebagai seorang eksistensialisme meskipun konsep eksistensialisme sebelumnya sudah diperkenalkan oleh Søren Kierkegaard. Selain terkenal menjadi seorang filsuf, Sartre juga terkenal sebagai penulis novel dan dramaturg (penulis naskah drama). Adapun tulisan dari Sartre sebagai berikut: “Being and Nothingness”, “Huis Clos”, “Les Mouches”, “Les Mains Sales”, “La Nausee” “Critique of Dialectic Reason”, “Les Mots” yang mendapatkan penghargaan dari lembaga kesenian Perancis namun dia tolak. Dan dia juga menjadi produser dalam drama “Cause du peuple” dan “Liberation” sampai 1974. Dia meninggal pada 1980.

Sartre menjadi professor filsafat ketika setelah wajib militer menjadi tentara Perancis pada Perang Dunia II. Tertangkap oleh tentara Jerman, dan kemudian melarikan diri pada 1941. Kemudian, dia dengan segera kembali ke Perancis dan kembali melakukan perlawanan terhadap Jerman sebagai seorang Jurnalis. Kemudian dia bergabung dengan partai komunis karena Sartre ingin ambil bagian untuk berperang bersama kaum proletar. Di zaman setelah perang dunia inilah Sartre sangat memberikan pengaruhnya dan meng-*influence* para kaum di jamannya.

Dalam filsafatnya, Sartre menawarkan ketiadaan Tuhan, tiadanya etika, dan bermaksud untuk membebaskan dari nilai-nilai sekuler agama yang telah lama ada, dimana Tuhan menggantikan sebuah statement etika dan pada akhirnya menolak eksistensi yang muncul dari sebuah jenis aturan atau petunjuk-petunjuk yang diberlakukan (mungkin yang dimaksud oleh Sartre adalah norma-norma). Dalam hal tersebut, Sartre memiliki solusi untuk menjadi seorang eksistensial dengan kesadaran akan keberadaan Subyek pada tindakan nyata manusianya. dengan mengambil posisi terhadap dunia, dan kepercayaan yang benar, yang kemudian muncul pertanyaan “apa yang akan terjadi jika semua tindakan adalah jalan?”. Keputusan dari subyek pada keyakinan yang benar, dan kebebasan, terletak (disandur dari (Sartre, 2014).

EKSISTENSIALISME JEAN-PAUL SARTRE

Sikap awal dalam eksistensialisme Sartre dalam moral (traktatnya) adalah ide kebebasan. Hal ini dipertegas dalam karyanya yang berjudul *l'Être et le Néant, Being and Nothingness*, di mana konsep dasar Sartre membangun filsafat eksistensialisme adalah kontingensi; *hakikat selalu menjadi atau berubah-ubah*. Dalam pengantar awal tadi telah dikatakan bahwa Sartre tidak menghendaki adanya etika yang bersumber kebenaran mutlak dan jelas, yang ada hanyalah sebuah etika sementara. Jadi, Sartre mencoba mengambil posisi bahwa pusat dari kebebasan adalah kebebasan manusia untuk melakukan sebuah tindakan. Kebebasan hanya bisa berwujud bila manusia mampu menjadi otentik. Selain mengatakan tentang kebenaran yang bersifat kontingensi, eksistensialisme Sartre juga terbangun konsep hubungan sosial manusia dengan teori utama “orang lain adalah neraka”. *Orang lain adalah neraka* merupakan konsep epistemologi sosial eksistensialisme yang memposisikan *yang-lain (other/l'autre)*, –orang lain-, sebagai objek yang mengganggu atau sebuah ancaman. Sebab, *yang-lain* dapat mengakibatkan kejatuhan diri manusia melalui tatapan mata (*le regard*) mereka. Tatapan mata *yang-lain* adalah sumber yang membuat manusia tidak lagi otentik –terasing dari dirinya sendiri-, karena manusia selalu dituntut oleh *l'autre* untuk menjadi *good boy* atau *nice girl*. Akibatnya diri sendiri (*self*) menjadi sosok yang berjiwa serius, *esprit de sieux*, dan menuju sebuah kebusuan; mutisme, ketika dihadapkan pada realitas. Hal itu bisa terjadi karena setiap orang mampu *melabeli* diri kita (*self*); *kamu bodoh, kamu pandai, kau ceroboh* dan lain-lain. Melalui tatapan, mereka (*yang-lain*) yang seakan-akan membebaskan sebuah kewajiban pada diri dan menuntut dipenuhi. Dengan kata lain, eksistensi diri muncul karena tatapan *yang lain*, dan *siapa aku* ditentukan oleh pandangan *yang-lain*. Baik buruk yang ada pada *diriku* ditentukan oleh *yang-lain* dengan mengobjektifikasi *aku* (Wibowo, 2011: 24-27).

Sartre mencontohkan dirinya sendiri yang mengalami kejatuhan ketika tatapan *yang-lain* mengobjektifikasinya dan berhasil membuatnya menjadi pribadi yang terkekang. Objektivikasi yang dimaksud adalah ketika Sartre disebut sebagai *makhluk bodoh matematika* oleh ayah tirinya. Dalam kasus tersebut, Sartre beranggapan bahwa

kita (manusia) mempunyai *dua pilihan* untuk mengatasinya. Pertama, *menyesuaikan diri secara pasif*, artinya menyerah dan menerima objektivikasi tersebut. Atau kedua, *memberontak* untuk mengembalikan lagi *defisit kebebasan* yang dirampas atau dikurangi oleh *yang-lain* akibat objektivikasi tadi. Manusia, dalam pandangan Sartre sesungguhnya bersifat *indeterministik*, *-cette indetermination de soi-meme-*. Hal ini sesuai dengan konsep eksistensialisme Sartre, sebagaimana penjelasan Wibowo (2011: 33-35), yang menyatakan bahwa manusia memiliki dua bentuk untuk mengada di dalam realitas yaitu; *etre en soi* (ada-pada-dirinya-sendiri) dan *etre pour soi* (ada-bagi-dirinya-sendiri). *Etre-en-soi* adalah bentuk manusia mengada dalam kepastian kodrati dan manusia tidak bebas. Sebab, manusia hidup sesuai dengan ketentuan kodrati yang sudah digariskan oleh Tuhan, atau dengan kata lain “adanya benda-benda adalah sesuatu yang begitu saja ada”. Artinya manusia berada dalam keajegan, tidak berubah. Sedangkan bagi Sartre, manusia yang berada adalah manusia yang bersifat *etre-pour-soi*. Karena manusia yang *ada-bagi-dirinya* sendiri memiliki kesadaran untuk menegasi setiap kejegan yang melekat pada dirinya. Sartre menyebutnya *man condemned to be free*, manusia dikutuk untuk bebas. Bebas karena kesadaran manusia mampu menguasai tubuhnya sendiri, di mana tubuh bersifat kontingensi. Konsep kebebasan Sartre dituliskan dalam bukunya yang berjudul *Being and Nothingness*.

Bagaimana dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM)? HAM dalam pandangan Sartre cukup jelas bahwa HAM hanya akan terpenuhi ketika manusia harus mampu menunjukkan eksistensi manusia yang bebas. Kaum eksistensialis percaya bahwa hakikat manusia adalah *eksistensi mendahului esensi*, keberadaan manusia mendahului hakikat manusia tersebut. Artinya, manusia terlebih dahulu berada; eksis, berkiprah dan berjumpa dengan dunia dan baru kemudian manusia mendefinisikan dirinya. Hal itu dapat tercapai jika manusia bebas. Dengan kesadaran kebebasan, manusia mampu menegasi atau mengingkari apapun yang mengekang dirinya, termasuk aturan-aturan Ilahi. Karena sesungguhnya manusia terlempar dalam endapan-endapan aturan yang sesungguhnya diciptakan manusia sendiri. Oleh karena itu, agar menjadi otentik, manusia harus bebas, bebas menindak atau menegasi segala aturan yang telah ada begitu saja di hadapan manusia semenjak dilahirkan.

Kebebasan manusia dapat dicapai hanya dengan menjadi manusia otentik untuk menindak dan bertanggung-jawab atas apa yang dikehendakinya. Karena pada dasarnya hubungan manusia dengan *yang lain* adalah konflik. Konflik muncul karena dialektika antara subjek-objek yang timpang. Relasi subjek-objek menggambarkan hubungan manusia satu dengan lainnya adalah *saling mengobjektivikasi melalui tatapan mata*. Si A menjadi objek Si B dengan menatapnya dan sebaliknya. Karena relasi yang terbentuk antar manusia adalah subjek-objek, maka relasi yang dibentuk manusia dengan *yang lain* selalu tidak berimbang, selalu ada yang lebih dominan sehingga hubungan yang terbentuk selalu konflik. Oleh sebab itu manusia esensinya adalah kebebasan. Bebas untuk melakukan apapun, termasuk menegasikan diri akan keberadaan Tuhan dengan segala risiko. Karena manusia selalu mencari keputusan etik dengan mencari *causa sui* (Tuhan) ketika mendapatkan kesusahan dan ketidak-nyamanan. Dan perilaku semacam itu tidaklah otentik sebagai manusia (Lanur, 2011: 75-77).

FENOMENA PENGHAPUSAN KOLOM AGAMA

Berkaitan dengan nilai-nilai kesamaan hak dan kebebasan, fenomena penghapusan kolom agama mulai merebak seiring dengan terpilihnya gubernur Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki Tjahja Purnama (Ahok) beberapa waktu lalu. Keduanya sepakat akan menghapuskan kolom agama pada KTP karena ada tidaknya kolom agama dianggap tidak berdampak apapun terhadap kehidupan masyarakat. “Manusia hanya perlu jujur terhadap dirinya sendiri soal taat atau tidak taatnya dalam beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing”. Ahok beranggapan bahwa pencantuman kolom agama di KTP justru membuat masyarakat terbagi-bagi atas mayoritas-minoritas agama. Seperti pada penggalan kalimat berikut; “*Dari dulu saya tidak mau ada kolom agama di KTP, saya udah bilang saat di DPR. Kenapa musti ada agama dalam KTP? Saya mau tau agama kamu untuk apa?*” (Republika, 2014). Bagi Ahok adanya kolom agama sering dipolitisasi dalam sebuah konflik. Pernyataan Wakil Gubernur Jakarta tadi didukung sepenuhnya oleh Direktur Megawati Institute, Siti Musdah Mulia, yang menilai, “selama ini agama kerap dipolitisasi dalam berbagai kepentingan jangka pendek”. “Semisal”, kata dia,

“pegawai yang berbeda agama dengan pimpinannya akan dipersulit saat naik jabatan” (Tempo, 2014).

Dua tokoh tadi memberikan nasihat implisit bahwa ada tidaknya kolom agama tidak berkorelasi langsung dengan baik-buruknya perilaku seseorang. Justru adanya kolom agama hanya dimanfaatkan sebagai alat politik untuk mencapai tujuan tertentu. Singkatnya, sesuai dengan konsep Sartre, manusia tidak otentik jika hanya mendasarkan diri pada kolom agama untuk menentukan siapa hakikat diri manusia sebenarnya. Kolom agama hanya akan memberikan pengaruh politik ketika terjadi konflik di dalam masyarakat. Misalnya agama A menindas agama B dan seterusnya. Selain pada tataran konflik masyarakat, kolom agama kadang juga menjadi alat politisasi dalam dunia pekerjaan. Namun, apakah esensi dicantumkannya kolom agama pada KTP hanya terkait persoalan semacam itu? Memang tidak banyak masyarakat yang peduli terhadap rencana tersebut. Namun, jika dilihat lebih dalam rencana penghapusan kolom agama pada KTP justru bertentangan dengan *kewajaran* dan *kenormalan* di Indonesia yang terbiasa dengan dimensi spiritual yang kental.

REFLEKSI EKSISTENSIALISME SARTRE TERHADAP KOLOM AGAMA YANG DIHAPUSKAN DARI KTP

Sesuai dengan konsep eksistensialisme Sartre, eksistensialisme mendasarkan diri pada konsep fenomenologi yang menjelaskan bahwa fenomena yang ada pada kebebasan manusia ada lima hal pokok yakni: 1) Manusia sebagai kebebasan total; 2) Kebebasan sebagai hukum; 3) Keberadaan Tuhan adalah penghalang terwujudnya kebebasan; 4) Kebebasan total dalam faktisitas; dan 5) Pertanggungjawaban atas kebebasan yang dilakukan.

Sebagai dasar pemikiran Sartre yang menginginkan kebebasan total ada pada pemikiran *etre pour soi* dimana manusia *ada-bagi-dirinya-sendiri* berimplikasi pada hubungan dengan manusia lain. Kata “bebas” justru menyatakan dan menyingkap sesuatu tentang diri manusia sendiri dan keadaan batinnya (Leenhounwers, 1988:91). Menurut Joseph Omoregbe (1976:20), Sartre beranggapan bahwa kebebasan manusia adalah radikal atau total. Artinya tidak ada batasan yang pasti mengenai kebebasan manusia kecuali kebebasan itu sendiri. Dengan menggunakan

kebebasannya, manusia dapat melampaui atau mengatasi masa lampaunya.

Melalui penekanan kebebasan total pada diri manusia, menurut Sartre, manusia seharusnya menjadi seorang ateis yang konsisten. Karena manusia bebas, manusia tidak lagi memiliki kewajiban apapun untuk dijalankan terhadap siapapun, termasuk Tuhan. Manusia hanya perlu bertindak pada dirinya sendiri. Menurut Sartre seandainya Tuhan itu ada, maka manusia akan kehilangan martabat manusiawinya, yang berarti kehilangan eksistensi otentiknya. Jadi mustahil bahwa Tuhan dan manusia sekaligus ada, -ada secara bersama-sama (Leahy, 1985: 69). Tuhan hanya membatasi perilaku manusia yang otentik. Dengan kematian Tuhan, eksistensi manusia dapat dijalankan.

Apabila konsep eksistensialisme Sartre ditarik pada wacana kebijakan penghapusan kolom agama pada KTP, maka kebijakan tersebut sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Sartre. Karena secara tidak langsung, penghapusan kolom agama pada KTP tadi mengandaikan bahwa manusia tidak lagi membutuhkan Tuhan sebagai pegangan dalam kehidupan, sebagai *causa sui*. Tentu dengan kebijakan tersebut, manusia mendapatkan kebebasan total atas hidup. Tidak lagi takut akan adanya dikotomi mayoritas dan minoritas dalam agama. Tidak lagi menghambat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dan yang paling penting tidak ada lagi politisasi dalam segala aspek yang berhubungan dengan kekuasaan Tuhan melalui agama. Karena *siapa Tuhanmu?* tidak dapat dilihat pada keterangan KTP.

Dimensi eksistensialisme yang ada pada fenomena tersebut adalah eksistensi yang bersifat materialistik. Alasannya, sudut pandang yang digunakan untuk menjelaskan penghapusan kolom agama pada KTP hanya dikarenakan untuk menghindari masalah-masalah sosial seperti konflik, masalah politisasi agama hingga hanya masalah pekerjaan. Sebab, konsep dasar manusia otentik bukanlah manusia menghindari terhadap *relasi konflik* yang bisa muncul ketika keputusan untuk mengambil tindakan melainkan bertanggungjawab atas segala pengambilan keputusan tersebut. Jadi aspek tanggungjawab pada penghapusan kolom agama pada kondisi tersebut bisa dibidang tidak ditemukan, karena justru membuat manusia tidak berani menunjukkan hakikat diri dan menjadi diri sendiri.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan tadi, dapat disimpulkan bahwa konsep kebebasan Sartre dalam memandang penghapusan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) mendasarkan diri pada kebebasan total manusia dengan tujuan mendapatkan jati diri manusia yang otentik. Selain kebebasan total, sisi lain manusia otentik jika tidak mencantumkan agama disebabkan manusia dapat menghindarkan diri pada anasir manusia lain yang membuatnya tidak bebas dari kekuasaan Tuhan dan termanifestasi dalam perbuatan politisasi manusia yang mengatasnamakan agama. Manusia adalah makhluk yang terkutuk untuk bebas dan harus selalu menindak dan bertanggungjawab akan faktisitasnya. Relasi manusia dengan *yang-lain* selalu bersifat konflik, karena *yang-lain* selalu mengobjektifikasi melalui tatapan mata. Moral tidak pernah pasti, yang ada hanyalah moral sementara. Oleh karena itu dari segi eksistensialisme Sartre adanya penghapusan kolom agama pada KTP justru memberikan kebebasan total pada manusia dan Tuhan, akan tetapi masih bersifat materialistik, belum sampai pada tataran tanggungjawab otentik. Sejalan dengan pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat kritik yang bisa dijadikan diskursus bahwa sesungguhnya pola eksistensialisme Sartre memiliki kekurangan, yaitu: (1) Sartre kemungkinan memiliki kesalahan pemahaman terhadap konsep fenomenologi

yang Sartre gunakan sebagai pisau dalam membentuk eksistensialisme. Karena penyingkapan yang dilakukan fenomenologi tidak sekadar mendasarkan diri pada subyek melainkan pada objek. Sehingga pandangan Sartre mengenai manusia sebagai satu-satunya pusat kebebasan menjadi rancu. (2) Pada tahap kebebasan total dengan menghilangkan Tuhan dari keberadaannya terlihat naif. Karena sesungguhnya Tuhan tetap ada meskipun tidak diakui. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sartre bahwa menjadi ateis memang tidak mengenakan karena tidak ada lagi pegangan yang bisa menenangkan hati dan pikiran ketika ada sesuatu yang terjadi di luar kekuasaan manusia. Sebab, keseluruhan hidup manusia adalah tanggungjawab murni pribadi. Di sini terlihat bahwa Sartre sesungguhnya mengakui adanya Tuhan. Tuhan bisa hadir kapanpun dan dimanapun karena bersama Tuhan-lah manusia memiliki pegangan hidup dan tetap menjalani hidupnya dengan penuh pengertian sadar. (3) Eksistensialisme Sartre cukup memberikan sisi positifnya yakni adanya tanggungjawab pada dirinya sendiri ketika melakukan tindakan. Meskipun perilaku yang dilakukan tidak selalu selalu sesuai dengan etika, namun manusia dituntut untuk selalu otentik dan tidak manipulatif terhadap kondisi serta posisinya sebagai manusia. Manusia sungguh-sungguh bisa menjadi dirinya sendiri. Singkatnya, *dare to life and dare to decide*.

DAFTAR RUJUKAN

- Hassan, Fuad. 1973. *Berkenalan Dengan Eksistensialisme*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Kaufmann, Walter. 1976. *Existensialism Religion and Death*. New York: New American Library.
- Lanur, Alex. *Relasi Antar-Manusia Menurut Jean-Paul Sartre, Beberapa Catatan*. By Wibowo, A. Setyo & Majalah Driyarkara. 2011. *Filsafat Eksistensialisme Jean-Paul Sartre*. Yogyakarta: Kanisius.
- Leahy, Louis. 1985. *Aliran-Aliran Besar Atheisme*. Yogyakarta: Kanisius
- Leenhouwers, P. 1988. *Manusia dalam Lingkungannya*. Jakarta: P. T. Gramedia
- Omeregbe, Joseph. 1976. *The Positive and Negative Aspect of Jean Paul Sartre*. Roma.
- Sartre, Jean-Paul. 1960. *Existentialism and Humanism*. London: Methuen & Co. Ltd., *L'Existentialisme est un Humanisme*, transl. Philip Mairet
- Wibowo, A. Setyo. & Majalah Driyarkara. 2011. *Filsafat Eksistensialisme Jean-Paul Sartre*. Yogyakarta: Kanisius.
- <http://kbbi.web.id/> (akses 20 Juni 2014)
- <http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/06/19/269586364/Alasan-Musdah-Mulia-Soal-Kolom-Agama-KTP-Dihapus> (akses pada 24 juni 2014)
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/06/19/n7ewh2-ahok-setuju-kolom-agama-dihapus-dari-ktp> (akses pada 24 juni 2014)
- <http://www.sartre.org/biography.htm> akses 5 Mei 2014